

BAB I PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

Pendapatan Asli Daerah (PAD) merupakan indikator untuk mengukur kemampuan otonomi yang dilakukan oleh daerah, dimana pendapatan asli daerah (PAD) antara lain digunakan untuk melaksanakan program dan kegiatan yang diselenggarakan daerah dalam pelayanan publik. Dalam hal ini, sistem perancangan APBD pun sangat berperan penting agar pemkot dapat menganalisis seberapa besaran Pendapatan Asli Daerah (PAD) secara mutlak dalam tiap periode penganggaran khususnya di Kota Pontianak.

Hal ini adalah agar dapat memberikan peluang lebih besar kepada pemerintah daerah untuk mengoptimalkan potensi yang ada, baik menyangkut sumber daya manusia, sumber daya alam, dana maupun sumber daya lain yang merupakan kekayaan daerah. Perubahan tersebut diimplementasikan dengan memberikan otonomi kepada pemerintah daerah yakni pemberian wewenang yang lebih luas kepada pemerintah daerah Kota Pontianak untuk mengatur dan mengelola pembangunan dan keuangan di daerah masing-masing.

Berdasarkan UU Nomor 23 Tahun 2014, kewenangan pemerintahan daerah meliputi hal-hal sebagai berikut.

1. Pemerintah daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya sesuai dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

2. Pemerintah daerah melaksanakan urusan pemerintahan yang diserahkan oleh pemerintah pusat menjadi dasar pelaksanaan otonomi daerah dengan berdasar atas asas tugas pembantuan.
3. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden dan pelaksanaannya dilimpahkan kepada gubernur dan bupati/walikota.

Otonomi daerah merupakan suatu kebebasan yang dimiliki daerah untuk membuat peraturan daerah, menyusun dan melaksanakan kebijakan, serta mengelola keuangan daerahnya secara mandiri (Sujarweni, 2015:231).

Rosemerry et al. (2016) mengungkapkan bahwa alasan diterapkannya kebijakan otonomi pada daerah karena pemerintah pusat tidak mampu sendiri mengawasi pembangunan daerah secara keseluruhan oleh sebab itu pemerintah pusat melimpahkan kewenangan terhadap pemerintah daerah untuk mengatur dan mengurus secara mandiri kepentingan-kepentingan daerahnya. Penerapan kebijakan otonomi daerah menyebabkan daerah agar mampu menggali dan mengembangkan potensi-potensi yang dimiliki daerah. Halaskova dan Halaskova (2016) mengemukakan bahwa potensi-potensi yang dimiliki daerah memiliki pengaruh pada kualitas dan ruang lingkup pelayanan kepada masyarakat

Pendapatan asli daerah (PAD) saat ini masih bersumber dari pajak, retribusi daerah, Laba Perusahaan Daerah, dan Pendapatan Lain – lain yang sah seperti aset - aset milik Pemerintah Kota Pontianak yang memiliki potensi dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Realisasi penerimaan Pemerintah Kota Pontianak tahun anggaran 2019

mencapai Rp 1,76 triliun meningkat jika dibandingkan dengan tahun 2018. Jika diukur dari tahun 2015 sampai tahun 2019, pendapatan dari pajak daerah meningkat 38,13 persen, hal ini menunjukkan kesadaran masyarakat akan pajak semakin baik. Lain-lain pendapatan asli daerah meningkat sebanyak 9,19 persen dari pendapatan tahun 2018. Lain-lain pendapatan asli daerah yang meningkat membuat pendapatan asli daerah tahun 2019 menurun sebanyak 9,20 persen jika dibandingkan dengan pendapatan asli daerah tahun 2018. Dana perimbangan meningkat 0,26 persen, meningkatnya jumlah dana perimbangan sangat didukung oleh dana alokasi umum yang meningkat 3,91 persen jika ditinjau dari tahun 2018. Sementara itu dana alokasi khusus dan dana bagi hasil pajak/ bagi hasil bukan pajak tahun 2019 menurun dibandingkan tahun sebelumnya. Belanja daerah tahun 2019 sebanyak 1,62 triliun rupiah atau meningkat 0,74 persen dari tahun 2018. Belanja Operasi meningkat dari 1,11 triliun rupiah tahun 2018 menjadi 1,18 triliun rupiah pada tahun 2019. Peningkatan jumlah tersebut disebabkan karena meningkatnya belanja barang tahun 2019. Sama halnya dengan tahun sebelumnya, belanja daerah tidak dilakukan untuk belanja bunga, belanja subsidi, dan belanja bantuan keuangan. Lain halnya dengan belanja modal yang menurun dari 490,8 milyar tahun 2018 menjadi 437,3 milyar tahun 2019. Pengeluaran untuk belanja tak terduga tahun 2019 sebesar 573 juta rupiah. Belanja modal untuk Jalan, Irigasi, dan jaringan yang menurun 5,91 persen dari pengeluaran tahun 2018. Belanja modal terbesar tahun 2019 terdapat pada belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan sebesar 250,92 milyar rupiah

sedangkan tahun 2017 belanja modal untuk belanja Jalan, Irigasi, dan jaringan sebesar 266,67 milyar rupiah.

Tabel 1.1
Realisasi Penerimaan Pemerintah Daerah Kota Pontianak, 2016 - 2019 (Rupiah)

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Daerah
2016	1,510,803,996,550.49	389.368.654.493,49	1,517,901,320,888.49
2017	1,545,622,287,316.32	508,574,478,117.00	1,506,213,246,799.83
2018	1,663,204,429,559.76	440,358,120,030.76	1,605,719,399,875.65
2019	1,756,000,000,000.00	468,920,000,000.00	1,780,000,000,000.00

Sumber : Laporan Audited Kota Pontianak 2016 – 2018, dan Berbagai Sumber

Berdasarkan hasil realisasi penerimaan PAD kota Pontianak setiap tahunnya mengalami peningkatan namun belanja daerah juga meningkat sehingga diharapkan dapat menyeimbangkan pemasukan daerah yang diterima oleh Pemerintah Kota Pontianak. PAD Kota Pontianak dalam kurun waktu 5 tahun. Menurut pandangan Mohamed (2017) dan Cruz et al (2018) bahwa dapat dikatakan penerimaan daerah (PAD) Kota Pontianak cukup optimal dan tidak terjadi ketergantungan keuangan daerah terhadap pemerintah pusat.

Disamping itu, Pemerintah Kota Pontianak juga memiliki Aset – aset yang berpotensi dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). tersebut antara lain adalah Gedung Pontianak Convention Centere (Gedung PCC), Gedung Parkir Jalan Suprpto, Gedung Serba Guna Di Jalan Zainuddin, Kolam Renang Ampera, Gedung Gym dan Fitness Centre Jalan Tabrani Ahmad.

Namun kurang optimalnya pemanfaatan asset menyebabkan kebutuhan

anggaran (*fiscal need*) dan kapasitas anggaran (*fiscal capacity*) tidak seimbang sehingga malah cenderung dapat menyebabkan kerugian sehingga menjadi beban APBD Kota Pontianak.

Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dapat didefinisikan sebagai rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang dibahas dan disetujui bersama oleh pemerintah daerah dan DPRD, dan ditetapkan dengan peraturan daerah. Kinerja anggaran pemerintah daerah selalu dikaitkan dengan bagaimana sebuah unit kerja pemerintah daerah dapat mencapai tujuan kerja dengan alokasi anggaran yang tersedia. Pengukuran kinerja sangat penting untuk menilai akuntabilitas organisasi dan manajer dalam menghasilkan pelayanan publik yang lebih baik.

Salah satu upaya pemerintah daerah adalah dengan mengelola dana dari masyarakat semaksimal mungkin adalah dengan menyusun anggaran (budget) sebagai acuan dalam melaksanakan setiap kegiatan. Anggaran pada sektor publik dinyatakan dalam bentuk Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD). Dalam hal tersebut akuntabilitas bukan hanya sekedar kemampuan menunjukkan bagaimana anggaran tersebut dipergunakan, akan tetapi juga meliputi kemampuan menunjukkan bahwa anggaran publik tersebut telah dibelanjakan secara efektif, efisien, dan ekonomis.

Dalam upaya meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Pontianak ini, maka diperlukan suatu kajian penelitian sebagai upaya

pengambilan langkah – langkah yang berdampak positif terhadap Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mampu mensejahterakan masyarakatnya sebagai bentuk langkah dan tindakan untuk mengoptimisasi aset – aset tersebut maka dibentuklah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang berfungsi sebagai badan pengelola aset tersebut. Berikut beberapa asset perumda yang terdaftar saat ini adalah Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

1.2. Perumusan Masalah

Dengan melihat latar belakang di atas, maka dapat dirumuskan bahwa tujuan dari kegiatan ini adalah mengumpulkan, menyusun dan menyajikan hasil penelitian *Optimalisasi Peningkatan PAD Daerah Melalui Pemanfaatan Aset dan BUMD di Kota Pontianak* secara komprehensif.

Sedangkan sasaran dari pekerjaan ini adalah :

- 1 Mengetahui potensi aset – aset daerah yang belum dioptimalkan pemanfaatannya, antara lain Gedung Pontianak Convention Centere (Gedung PCC), Gedung Parkir Jalan Suprpto, Gedung Serba Guna Di Jalan Zainuddin, Kolam Renang Ampera, Gedung Gym dan Fitness Centre Jalan Tabrani Ahmad
- 2 Mengetahui potensi dan kontribusi PERUMDA yang dimiliki oleh Pemerintah Kota Pontianak dalam mendongkrak PAD daerah

1.3. Tujuan Penulisan Kajian

1. Untuk menganalisis optimalisasi penggunaan aset – aset Pemerintah Daerah yang masih pasif.

2. Untuk menganalisis bagaimana setoran modal pemkot ke PERUMDA.
3. Untuk memperoleh rekomendasi akhir sebagai wacana dalam meningkatkan PAD Kota Pontianak.
4. Untuk menganalisis dan mengetahui besaran PAD Kota Pontianak, anggaran belanja daerah, dan realisasi anggaran Kota Pontianak dengan tahun banding 2016 - 2019

1.4. Sumber Data

Sumber data berasal dari :

- a. Data Primer: Adalah data yang dikumpulkan (diperoleh) langsung dari dinas atau instansi terkait melalui pengisian daftar pertanyaan (daftar isian) maupun data yang telah dikumpul dan disusun oleh instansi yang bersangkutan tetapi belum diolah (dipublikasi).
- b. Data Sekunder: Adalah data (informasi) yang diperoleh dari instansi atau dinas yang sudah diolah dan dipublikasikan baik dalam bentuk laporan, dokumendokumen maupun dalam bentuk publikasi ilmiah lain

1.5. Dasar Hukum Kajian

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1), kewenangan pemerintahan daerah
2. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 12 tahun 2019 tentang pengelolaan keuangan daerah
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor No. 54 Pasal 29 ayat (2) Tahun 2017

4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 21 ayat (1)
5. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2011 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah pada Pasal 26 ayat (1)
6. Berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 37 tahun 2011 tentang pedoman penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

1.6. Manfaat Penelitian

manfaat yang diharapkan dari penelitian ini adalah :

1. Bagi Pengkaji, hasil kajian ini dapat menambah pengetahuan dan pemahaman mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Pontianak.
2. Bagi Praktisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan bagi Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota di Provinsi Kota Pontianak dan dapat menjadi acuan dalam pembuatan kebijakan di masa yang akan datang sehingga dapat lebih meningkatkan kesejahteraan rakyat.
3. Bagi Akademisi, hasil penelitian ini diharapkan dapat menjadi bahan masukan bagi akademisi dalam mengembangkan ilmu pengetahuan di bidang Akuntansi Pemerintahan khususnya mengenai faktor-faktor yang mempengaruhi Kinerja Keuangan Pemerintah Daerah di Kota Pontianak.

1.7. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

BAB I LATAR BELAKANG

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, serta sistematika penulisan. Serta landasan teori kajian

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini merupakan uraian gambaran umum materi kajian serta kerangka pemikiran dan pengembangan hipotesis.

BAB III RENCANA KERJA

Bab ini berisi langkah – langkah rencana kerja, jadwal kegiatan dan susunan organisasi pelaksana kajian ini.

BAB IV GAMBARAN UMUM OPTIMALISASI ASET

Berisi mengenai gambaran umum, ruang lingkup kajian, teknik analisis data, metode dan analisis rasio

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Berisi mengenai simpulan dan rekomendasi kajian yang diperoleh berdasarkan pengamatan data maupun lapangan.

BAB II

LANDASAN TEORI

2.1. Tinjauan Teori

Teori anggaran berbasis optimalisasi (*performance based budgeting*), yang dikemukakan oleh Bastian (2010) yang menyatakan bahwa “Anggaran berbasis kinerja adalah sistem penganggaran yang berorientasi pada output organisasi dan berkaitan sangat erat dengan visi, misi serta rencana strategis organisasi. Dimana *performance budgeting* mengalokasikan sumber daya ke program, bukan ke unit organisasi semata dan memakai pengukuran output (*output measurement*) sebagai indikator kinerja organisasi. Lebih jauh, pengkaitan biaya dengan output organisasi merupakan bagian integral dalam berkas anggarannya. Dengan kata lain, *performance budgeting* adalah teknik penyusunan anggaran berdasarkan pertimbangan beban kerja (*work load*) dan biaya unit (*unit cost*) dari setiap kegiatan yang terstruktur. Pengukuran output (*output measurement*) yang dikaitkan dengan biaya adalah pengukuran tingkat efisiensi dan efektivitas. Hal ini sekaligus merupakan alat untuk dapat menjalankan prinsip akuntabilitas, karena yang diterima oleh masyarakat pada akhirnya adalah output dari suatu proses kegiatan organisasi

2.2. Aset

Pengertian aset adalah sumber daya ekonomi yang dikuasai dan atau dimiliki oleh pemerintah sebagai akibat dari peristiwa masa lalu dan dari mana manfaat ekonomi dan sosial di masa depan diharapkan dapat diperoleh baik oleh pemerintah maupun masyarakat serta dapat diukur dalam satuan uang termasuk

sumber dayanonkeuangan yang diperlukan untuk penyediaan jasa bagi masyarakat umum dan sumber-sumber daya yang dipelihara karena alasan sejarah dan budaya.

Landasan teori lainnya yang menjelaskan fisik atau bentuk digunakan *Theory of Documentality* (teori dokumentalitas) dirumuskan oleh Maurizio Ferraris sejak 2005. Untuk menerangkan “objek sosial” Dia mengatakan bahwa objek sosial adalah objek di atas objek fisik. Dijelaskan bahwa “dalam konteks misalnya (Bangunan) C objek fisik X adalah objek sosial Y”. Faktor terpenting dalam mewujudkan realitas sosial. Ketergantungan realitas sosial pada dokumen inilah yang disebut dokumentalitas. Dapat juga disebut sebagai “bukti dokumen” atau *the power of document*. Dengan teori tersebut diperoleh sebuah kesimpulan kajian berdasarkan hasil dokumentasi atau gambar/foto terbaru yang pengkaji peroleh di lapangan. Antara lain dijabarkan sebagai berikut.

Dari penjelasan teori diatas adanya aset yang dapat memberikan pendapatan dan sebaliknya kerugian. Hal ini karna perlunya optimalisasi aset yang produktif dan aset yang komsumtif

2.2.1. Aset Produktif

Aset produktif adalah aset yang mampu menghasilkan. Ataupun apabila aset tersebut tidak menghasilkan, namun di masa depan nilainya meningkat. Hal ini sesuai dengan teori yang dikemukakan oleh Bastian (2005:24) bahwa upaya untuk menciptakan pengelolaan anggaran berbasis kinerja diharapkan akan mampu memenuhi berbagai tuntutan dan dan kebutuhan masyarakat, yaitu terbentuknya semangat desentralisasi, demokrasi, transparansi, dan akuntabilitas dalam proses penyelenggaraan Pemerintah pada umumnya dan proses pada

pengelolaan keuangan daerah pada khususnya. Artinya mendorong berbasis aset produktif akan mendukung optimalisasi pendapatan Pemkot

2.2.2. Aset Komsumtif

Aset konsumtif tidaklah menghasilkan, serta pengeluarannya lebih besar seiring waktu dari pada pendapatannya. aset konsumtif dapat menghasilkan kepuasan untuk konsumennya, namun yang harus diperhatikan kelangsungan kemampuan pemkot memberikan bantuan dalam menjalankan aktivitas pengelolaan aset tersebut. ini sejalan dengan Anggarini dan Puanto (2010:99) yang menyatakan bahwa sistem optimalisasi berbasis kinerja merupakan suatu sistem penyusunan anggaran yang menekankan pada hasil dan mengendalikan belanja. Sistem ini terutama berusaha untuk mengaitkan langsung antara keluaran (*outputs*) dengan hasil (*outcomes*) yang disertai dengan penekanan terhadap efektivitas dan efisiensi anggaran yang dialokasikan.

2.3. Ruang Lingkup Aset-Aset Pemerintah Kota Pontianak

Kajian ini berbentuk studi lapangan berdasarkan suatu objek dari dokumentasi atas laporan bangunan aset dan laporan keuangan perumda Pemerintah Kota (Pemkot) yang terdiri dari aset sebagai berikut : Pontianak Convention Center (PCC), gedung parkir kolam renang ampera, GYM dan bangunan serbaguna dan.

Berikut ini gambaran umum aset-aset Pemerintah Kota Pontianak (Pemkot) sebagai berikut :

2.3.1. Aset Pontianak Convention Center (PCC)

Pontianak Convention Center (PCC) adalah venue terbesar yang ada di Kalimantan Barat. Venue ini pertama kali diresmikan pada tahun 2004 oleh Presiden RI Megawati Soekarno Putri. PCC biasanya difungsikan untuk Exhibition, Entertainment, dan Meeting. Gedung Pontianak Convention Center yang dibangun di Jalan Sultan Abdurrahman, Pontianak, Kalimantan Barat, Gedung yang dibangun di bekas Gedung Arena Remaja ini kerap digunakan untuk perhelatan pernikahan ataupun kegiatan-kegiatan pameran.

2.3.2. Aset Gedung Pakir

Gedung Parkir Kota Pontianak, sudah mulai aktif per awal Januari 2020. Gedung lima lantai itu dilengkapi lift dan tangga dengan kapasitas mampu menampung sebanyak 300 mobil dan 200 sepeda motor. Selain itu, juga disediakan delapan kios untuk diisi para pelaku usaha kuliner. Mengenai besaran tarif parkir di Gedung Parkir Kota Pontianak tersebut, berdasarkan pengumuman Dinas Perhubungan sesuai Perda Nomor 1 tahun 2011 tentang Retribusi Jasa Usaha, untuk tarif parkir roda dua dikenai biaya Rp 1.000 untuk 2 jam pertama dan di jam berikutnya dikenakan biaya Rp 1.000 per jam. Sedangkan untuk kendaraan roda empat dikenai biaya Rp 2.000 ribu untuk 2 jam pertama dan Rp 2.000 per jam berikutnya. Gedung parkir yang berada bersebelahan dengan Hotel Neo itu akan beroperasi selama 24 jam.

2.3.3. Aset Kolam Renang Ampera

Fasilitas olahraga yang dibangun dengan standar olimpiade ini diresmikan langsung oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji. Adalah Kolam Renang Ampera yang terletak di Jalan Ujung Pandang II (Ampera) Kelurahan Sungai Jawi Kecamatan Pontianak Kota, Luas lahan keseluruhan sekitar 6 hektar Kolam renang yang menelan dana sekitar Rp24 miliar. Kolam renang ini dibangun dengan tujuan mendukung peningkatan prestasi di Persatuan Renang Seluruh Indonesia (PRSI) Kota Pontianak

2.3.4. Bangunan GYM

Dibangun sebagai sarana dan prasarana yang melengkapi fasilitas olahraga di Kota Pontianak. Sebuah Bangunan Gedung Gym Center berdiri megah di Jalan Tabrani Ahmad diresmikan oleh Wali Kota Pontianak, Sutarmidji, Minggu (28/1). Pembangunan gedung seluas 840 meter persegi ini bersumber dari APBD Kota Pontianak dengan menelan dana senilai Rp3 miliar lebih. Sedangkan peralatan olahraga gym menelan dana sebesar Rp190 juta.

Dibangunnya Gedung Gym Center bertujuan agar dapat dimanfaatkan oleh siswa-siswa untuk melatih fisik secara intensif. Selain itu, keberadaan Gym Center ini juga sebagai fasilitas bagi kegiatan bina raga. Fasilitas Gedung Gym Center ini dilengkapi dengan beberapa ruangan, yakni ruang lobby, cafetaria, ruang persiapan, ruang kardio, ruang fitness, ruang administrasi, toilet, ruang loker dan kamar ganti.

2.3.5. Bangunan Serbaguna

Gedung serbaguna terletak di jalan Zainuddin Kota Pontianak. Gedung ini didirikan dengan tujuan untuk digunakan ke berbagai acara seperti rapat, seminar, workshop, pertemuan, kegiatan kesenian, dan umum lainnya. Selain itu, aula gedung serba guna ULKI juga bisa menjadi pilihan gedung resepsi, pernikahan dan hajatan lainnya. Harga sewa gedung serba guna ini terjangkau (murah) dengan kondisi yang sangat bagus, terlebih gedung ini luas dapat menampung banyak orang / tamu.

2.4. Aset Pemerintah Kota Pontianak Berbadan Hukum

PERUMDA adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki satu daerah dan tidak terbagi atas saham. Peseroda adalah BUMD yang berbentuk Perseroan Terbatas dengan modal yang terbagi atas saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh 1 (satu) daerah. Hal ini membuat perbedaan kedudukan Kepala Daerah selaku mewakili Pemerintah Daerah dalam Kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan. Apabila dalam PERUMDA, Kepala Daerah berkedudukan sebagai pemilik modal (selanjutnya disebut (KPM). Pemerintah Kota Pontianak memiliki aset yang berbadan hukum yaitu Perumda Air Tirta Minum Khatulistiwa Kota Pontianak dan Perumda Air Minum Khatulistiwa Kota Pontianak.

2.4.1. Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

Pembangunan sarana dan prasarana infrastruktur air bersih kota Pontianak dimulai tahun 1959. Pemerintah Kota Pontianak dalam mewujudkan pelayanan publik yang prima dan mampu mensejahterakan masyarakatnya sebagai bentuk langkah dan tindakan untuk mengoptimalisasi asset – asset tersebut maka

dibentuklah Perusahaan Umum Daerah (PERUMDA) yang berfungsi sebagai badan pengelola aset tersebut. Salah satu tujuan perumda adalah mengelola perusahaan secara professional yang menjamin tercapainya laba optimal sehingga memberikan kontribusi positif bagi semua *stakeholder*

2.4.2. PUD BPR Khatulistiwa Kota Pontianak

Perusahaan Umum Daerah Bank Perkreditan Rakyat Bank Pasar Kota Pontianak adalah perusahaan yang dimiliki oleh pemerintah daerah Kota Pontianak yang bergerak dibidang Jasa keuangan khususnya di bidang perbankan didirikan pada tanggal 18 Desember 1963 dengan landasan Perda Nomor 12 tahun 1963 yang sudah beberapa kali dilakukan perubahan Perda guna penyempurnaan dengan data sebagai berikut :

- Perda Nomor 1 tahun 1969
- Perda Nomor 2 tahun 1975
- Perda Nomor 3 tahun 1985
- Perda Nomor 13 tahun 1996
- Dan terakhir Perda Nomor 4 tahun 2015 yang sebelumnya Perusahaan Daerah menjadi Perusahaan Umum Daerah

Tempat dan kedudukan PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak dalam menjalankan operasionalnya beralamatkan di jalan Gajahmada Komp. Pasar Flamboyan . Dalam menjalankan operasi usahanya PUD BPR Bank Pasar Kota Pontianak memiliki perizinan berdasarkan Nomor Pokok Wajib pajak No.01.110.640.8.701.000 yang dikeluarkan oleh Departemen keuangan Republik Indonesia, Direktorat Jendral Pajak kantor Wilayah DJP Kalbar Kantor Pelayanan Pajak Pontianak.

Usaha yang dijalankan oleh PUD BPR bank Pasar adalah sebagai berikut :

- Menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan berupa Deposito berjangka, Tabungan/ atau bentuk lain yang dipersamakan dengan itu.
- Memberikan kredit dan melakukan pembinaan khususnya terhadap pengusaha golongan ekonomi lemah
- Melakukan kerjasama antar lembaga perbankan atau lembaga keuangan lainnya
- Menjalankan usaha-usaha perbankan lainnya yang lazim dilakukan oleh bank perkreditan Rakyat sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan Perundang-undangan yang berlaku

Tujuan didirikannya Perusahaan daerah ini adalah untuk membantu dan mendorong pertumbuhan ekonomi dan pembangunan daerah disegala bidang serta sebagai salah satu sumber pendapatan daerah dalam rangka meningkatkan taraf hidup.

BAB III RENCANA KERJA

3.1 Waktu dan Jadwal Pelaksanaan Pekerjaan

Kegiatan ini akan dilaksanakan selama 1 (satu) bulan atau 30 (tiga puluh) hari kalender dengan rincian kegiatan (schedule) sebagai berikut:

1. Langkah Persiapan
2. Penyusunan laporan pendahuluan
3. Survey ke lokasi
4. Identifikasi dan verifikasi data
5. Kajian, analisis dan kompilasi data
6. Penyusunan draft laporan akhir
7. Diskusi/ Persentasi
8. Penyusunan laporan akhir

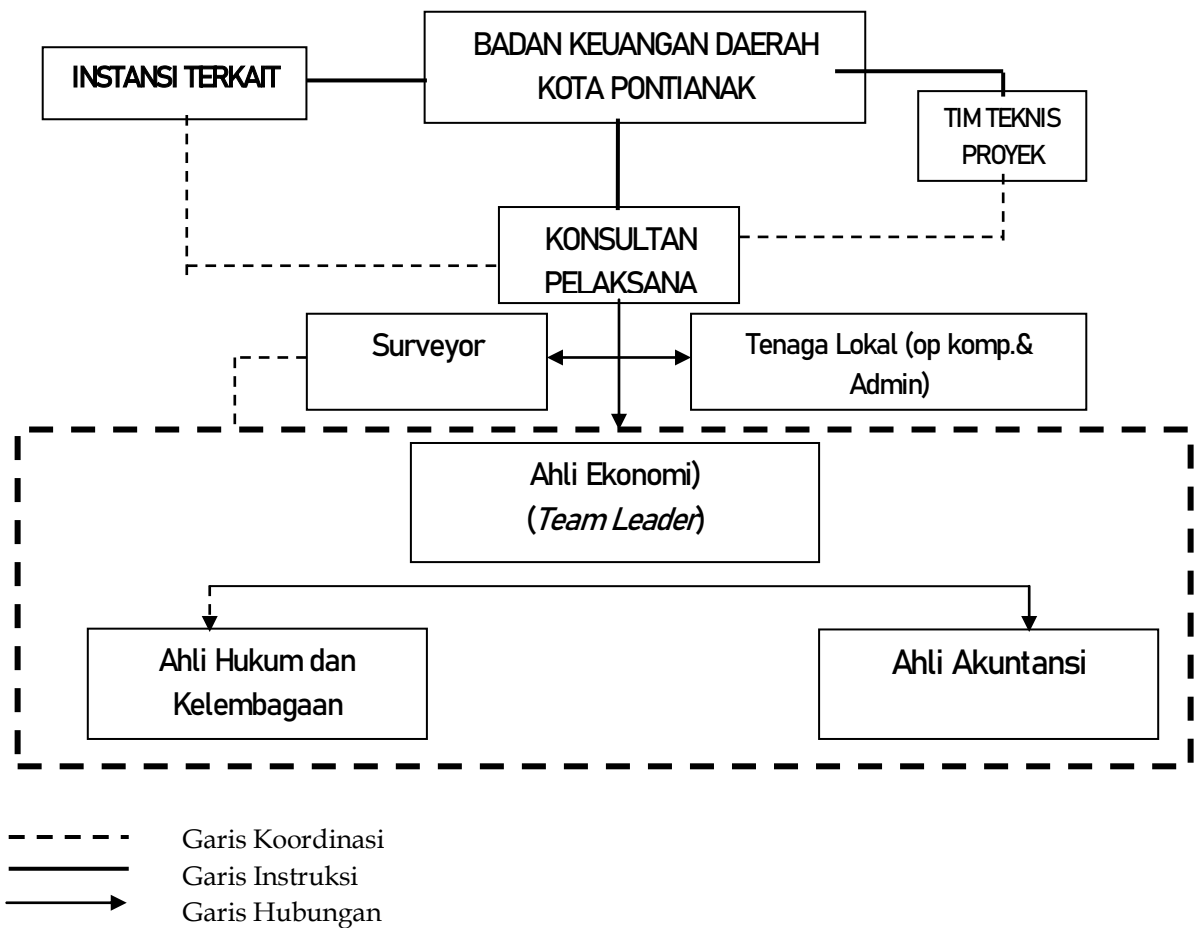
Secara rinci mengenai jadwal kegiatan dapat dilihat tabel berikut.

**Tabel 3.1
Jadwal Kegiatan**

No.	Kegiatan	Minggu			
		1	2	3	4
1.	Langkah Persiapan				
2.	Penyusunan Laporan Pendahuluan				
3.	Survey ke lokasi				
4.	Identifikasi dan verifikasi data				
5.	Kajian, analisis dan kompilasi data				
6.	Penyusunan draft laporan akhir				
7.	Diskusi/ Persentasi				
8.	Penyusunan laporan akhir				

3.2 Organisasi Pelaksana

Kelancaran dan keberhasilan program-program yang akan dilaksanakan dalam penanganan pekerjaan ini merupakan tanggung jawab Konsultan dan Pihak Pemilik Pekerjaan (Badan Keuangan Daerah Kota Pontianak). Oleh karena itu, Pihak Konsultan sebagai Pelaksana pekerjaan berusaha semaksimal mungkin menyiapkan tenaga ahli dan tenaga pendukung sebaik-baiknya. Berikut struktur organisasi dalam pelaksanaan pekerjaan ini:



3.3 Personil dan Tanggungjawabnya

Kebutuhan Tenaga Ahli (Tenaga Ahli dan Tenaga Pendukung) dalam kegiatan **Kajian Analisis Kota Pontianak** terdiri dari Tenaga Ahli (*Professional*), dan Tenaga Pendukung (*Supporting*). Masing-masing personil tersebut memiliki tanggung jawabnya, yaitu :

A. Tenaga Ahli (*Professional*)

Tenaga Ahli yang dibutuhkan dalam pelaksanaan pekerjaan ini adalah:

(1) Ahli Ekonomi Manajemen (*Team Leader*)

Ahli Ekonomi Manajemen sebanyak 1 (satu) orang dan minimal adalah Sarjana (S2) Magister Manajemen yang berpengalaman dalam analisis/kajian ekonomi/ekonomi manajemen dengan pengalaman kerja paling sedikit 3 (tiga) tahun. Ahli Ekonomi Manajemen bertugas menganalisis, memverifikasi dan menyusun data-data kedalam laporan sesuai substansi pekerjaan. Sebagai team leader bertanggungjawab secara penuh terhadap pelaksanaan pekerjaan. Sebagai pimpinan tim maka akan bekerja secara penuh selama pelaksanaan pekerjaan yaitu selama 3 (tiga) bulan.

(2) Ahli Ekonomi Pembangunan

Ahli Ekonomi Pembangunan sebanyak 1 (satu) orang dan minimal adalah Sarjana (S1) Ekonomi Pembangunan yang berpengalaman dalam analisis/kajian ekonomi/ekonomi pembangunan sedikitnya 2 (dua) tahun. Ahli Ekonomi Pembangunan bertugas menganalisis, memverifikasi dan

menyusun data-data yang relevan dengan substansi pekerjaan dan bertanggung-jawab kepada team leader dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Sebagai Ahli Ekonomi Pembangunan akan dipekerjakan selama 3 (tiga) bulan.

(3) Ahli Akuntansi

Ahli Akuntansi sebanyak 1 (satu) orang dan minimal adalah Sarjana (S1) Ekonomi Akuntansi yang berpengalaman dalam analisis/kajian/perhitungan akuntansi sedikitnya 2 (dua) tahun. Ahli Akuntansi bertugas menganalisis, memverifikasi dan melakukan perhitungan secara akuntansi terkait dengan substansi pekerjaan dan bertanggung-jawab kepada team leader dalam pelaksanaan pekerjaan ini. Sebagai Ahli Akuntansi akan dipekerjakan selama 3 (tiga) bulan.

B. Tenaga Pendukung (*Supporting*)

Tenaga pendukung pekerjaan ini terdiri dari :

1) Tenaga Administrasi/ Keuangan

Tenaga Administrasi/Keuangan sebanyak 1 (satu) orang yang disyaratkan minimal adalah lulusan S-1 Semua Jurusan dan memiliki pengalaman mengurus administrasi pekerjaan jasa konsultasi/penelitian. dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun kelulusan.

2) Surveyor

Tenaga Surveyor sebanyak 3 (tiga) orang yang disyaratkan minimal adalah lulusan D-3 Semua jurusan minimal 1 (satu) tahun kelulusan.

3) Operator Komputer

Tenaga Operator Komputer sebanyak 1 (satu) orang yang disyaratkan adalah lulusan D-3 semua jurusan, menguasai pengoperasian Ms Word, MS Excel, Power Point dan program lainnya yang terkait, dengan pengalaman minimal 1 (satu) tahun kelulusan.

3.4 Jadwal Penugasan Personil

Jadwal ini disusun berdasarkan rencana kerja yang telah diuraikan sebelumnya dan sesuai dengan tanggung jawab tenaga ahli dalam melaksanakan pekerjaan ini yang tertuang dalam Kerangka Acuan Kerja. Selain itu, pada jadwal penugasan tersebut, ditambahkan pula mengenai jadwal penugasan dari tenaga pendukung. Dengan adanya jadwal ini diharapkan masing-masing tenaga ahli dan tenaga pendukung dapat bertanggungjawab terhadap pelaksanaan pekerjaan agar tepat waktu sesuai dengan kontrak kerjaan dengan pihak pemberi kerja. Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 3.2.
Jadwal Penugasan Personil

No	Posisi	Minggu				Jml OB
		I	II	III	IV	
A	Tenaga Ahli					
1	<i>Team Leader</i> (Ahli Ekonomi)					1
2	Ahli Hukum dan Kelembagaan					1
3	Ahli Akuntansi					1
Jumlah OB Tenaga Ahli						3
B	Tenaga Pendukung					
1	Administrasi/Keuangan					1
2	Surveyor					2
3	Operator Komputer					4
Jumlah OB Tenaga Pendukung						7
JUMLAH A + B						10

3.5 Sistem Pelaporan

Pelaporan Kegiatan **Kajian Analisis Kota Pontianak** dilakukan dengan sistematika sebagai berikut:

a. Laporan Pendahuluan

Laporan Pendahuluan merupakan laporan perdana yang berisikan :

1. Pemahaman Konsultan terhadap pekerjaan;
2. Tinjauan potensi yang ada pada wilayah pekerjaan;
3. Pendekatan dan metodologi pelaksanaan pekerjaan;
4. Organisasi pelaksanaan dan tenaga pelaksana yang ditempatkan dalam pekerjaan ini;
5. Rencana kerja dan jadwal pelaksanaan pekerjaan serta pengumpulan data yang harus dilakukan.

Laporan Pendahuluan diserahkan selambat-lambatnya 7 (tujuh) hari kalender atau (satu) minggu sejak SPMK diterbitkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengguna Anggaran. Laporan Pendahuluan ini diberikan kepada PPK/PPTK sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) Eksemplar Buku.

b. Laporan Akhir

Laporan Akhir adalah laporan final yang merupakan hasil penyempurnaan Laporan Akhir Sementara dan telah memuat seluruh isi produk pekerjaan ini sesuai dengan Kerangka Acuan Kerja (KAK) yang digariskan. Laporan Akhir ini diserahkan selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari kalender atau 1 (satu) bulan sejak SPMK diterbitkan kepada Pejabat Pembuat Komitmen/ Pengguna Anggaran. Laporan Akhir ini dicetak sebanyak masing-masing 10 (sepuluh) rangkap dalam bentuk Hard Copy (buku) dan diserahkan kepada PPK/PPTK.

BAB 4

GAMBARAN UMUM OPTIMALISASI ASET

4.1. Ruang Lingkup Kajian

Kajian ini berbentuk studi dokumentasi atas laporan Pemerintah Kota Pontianak (Pemkot) terdiri dari aset Pontianak Convention Center (PCC), gedung parkir, kolam renang ampera , GYM dan bangunan serbaguna, serta aset Pemkot yang berbadan hukum yaitu Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dan PUD BPR Khatulistiwa Kota Pontianak

Ini menjadi objek optimalisasi PAD Kota Pontianak Ruang lingkup optimalisasi sebagai berikut :

1. Data anggaran dan realisasi PAD Kota Pontianak, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak.
2. Data anggaran dan realisasi dana perimbangan Kota Pontianak, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak.
3. Data anggaran dan realisasi pendapatan lainnya Kota Pontianak, pada anggaran pendapatan dan belanja daerah Kota Pontianak.

4.2. Sumber dan data

Penelitian ini menggunakan data sekunder, yaitu data target dan realisasi optimalisasi aset dengan rasio pendapatan terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD) dan pendapatan lainnya, belanja terdiri dari belanja tidak langsung dan belanja langsung, yang diambil dari APBD Kota Pontianak tahun anggaran 2016 sampai tahun 2019. Serta data lapangan berupa aset -aset pemerintah kota Pontianak. Penjelasan mengenai data yang dimaksud adalah.

1. Pendapatan asli daerah (PAD) yang dimaksud adalah realisasi pendapatan asli daerah yang berasal dari pajak daerah, retribusi daerah, laba usaha daerah, dan pendapatan lain-lain yang sah.
2. Dana perimbangan adalah dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi, serta dana bagi hasil pajak dan bukan pajak dari pemerintah pusat dan pemerintah provinsi.
3. Belanja Langsung adalah belanja yang diperuntukkan untuk membangun sarana dan prasarana infrastruktur serta belanja yang ditujukan kepada masyarakat di daerah.

Seperti yang telah dikemukakan di atas, data yang digunakan dalam penelitian ini dikategorikan sebagai data Dokumen yang diperoleh dari beberapa sumber dengan mengambil data laporan audited Pemerintah Kota Pontianak 2016-2019 yang sudah ada serta dokumen-dokumen lain yang terkait dan diperlukan. Adapun data di jabarkan antara lain:

1. Data penjabaran Target dan Realisasi Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak yang diperoleh dari Perhitungan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Pontianak Tahun 2016 - 2019.
2. Laporan Keuangan Aset Kota Pontianak Laporan neraca, Laba Rugi, Ekuitas dan Arus Kas menggambarkan kemampuan merealisasikan pendapatan perusahaan yang direncanakan dibandingkan pendapatan. (tahun asset berjalan)
3. Laporan Keuangan Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dan PUD BPR Khatulistiwa Laporan neraca, Laba Rugi, Ekuitas dan Arus Kas

menggambarkan kemampuan merealisasikan pendapatan perusahaan yang direncanakan dibandingkan pendapatan. 2016-2019

4.3. Teknik Analisis Data

Dalam penelitian ini digunakan dua teknik analisis, yaitu:

1. Analisis Deskriptif

Analisis deskriptif merupakan suatu bentuk analisis yang menggambarkan pola-pola yang konsisten dalam data dengan kegiatan mengumpulkan dokumentasi menurut Sugiyono (2015: 329) adalah suatu cara yang digunakan untuk memperoleh data dan informasi dalam bentuk buku, arsip, dokumen, tulisan angka dan gambar yang berupa laporan serta keterangan yang dapat mendukung penelitian, mengelompokkan / memisahkan komponen / bagian yang relevan dari keseluruhan data sehingga data mudah dikelola dan hasilnya dapat dipelajari, ditafsirkan secara singkat dan penuh makna.

Analisis ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran tentang kondisi keuangan daerah Kota Pontianak dengan melihat pertumbuhan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dari tahun ke tahun dan besarnya kontribusi PAD terhadap APBD.

2. Analisis Kuantitatif

Analisis kuantitatif merupakan analisis yang menggunakan data yang diukur dalam suatu skala numerik/angka. (Mudrajad Kuncoro, 2003) Analisis ini bertujuan untuk mengetahui tingkat kemampuan keuangan daerah, tingkat kemandirian daerah serta kesiapan pemerintah daerah Kota Pontianak dalam penyelenggaraan otonomi daerah.

4.4. Analisis Rasio

Untuk memberikan sebuah gambaran umum antara aktivitas tahun lalu dan sekarang agar dapat membaca kinerja Pemerintah Kota Pontianak berikut dari analisis rasio sebagai berikut :

1. Analisis Pertumbuhan

Pertumbuhan merupakan perubahan suatu kuantitas dari waktu tertentu dibandingkan waktu sebelumnya. Analisis pertumbuhan adalah metode yang digunakan untuk menganalisis berapa nilai pertumbuhan suatu faktor yang dianalisis dari waktu tertentu terhadap waktu sebelumnya untuk menggambarkan seberapa besar kemampuan pemerintah daerah dalam mempertahankan dan meningkatkan keberhasilan yang dicapai dari periode ke periode lainnya. Metode analisis pertumbuhan menghitung pertumbuhan anggaran pendapatan dan belanja daerah meliputi sisi penerimaan dan sisi belanja, baik belanja tidak langsung maupun belanja langsung, dengan rumus sebagai berikut (Widodo,1990) :

$$r = \frac{P_n - P_o}{P_o} \times 100 \%$$

Keterangan :

r : tingkat pertumbuhan (dalam %).

P_n : realisasi sektor pada tahun n.

P_o : realisasi sektor pada tahun n – 1.

Berikut tabel analisis pertumbuhan menggunakan rumus tarlampir sebagai berikut :

Tabel 4.1
Analisis Pertumbuhan PAD
Kota Pontianak
2016 – 2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Belanja Daerah	Analisis Pertumbuhan
2016	1,510,803,996,550	393,018,186,114	1,517,901,320,888	60.81%
2017	1,545,622,287,316	508,574,478,117	1,506,213,246,799	21.13%
2018	1,663,204,429,559	440,358,120,030	1,605,719,399,875	-7.50%
2019	1,756,000,000,000	468,920,000,000	1,780,000,000,000	6.49%

Sumber : *Laporan Audited Kota Pontianak 2016 – 2018, dan 2019 Berbagai Sumber*

Berdasarkan tabel 4.1 diatas analisis pertumbuhan PAD kota pontianak dikatakan kurang stabil terlihat dari pendapatan daerah yang sempat menurun di tahun 2018 dibandingkan tahun anggaran 2017, sehingga mengalami kemerosotan analisis pertumbuhan sebesar -7.50%, namun masih dikategorikan cukup baik dan meningkat di tahun berikutnya.

2. Analisis Kontribusi Sektor

Metode analisis kontribusi sektor adalah sumbangan atau peranan (share) yang diberikan oleh masing-masing sektor. Sektor disini adalah komponen-komponen dari sisi pendapatan yang terdiri dari pendapatan asli daerah (PAD), dana perimbangan dan pendapatan lainnya, maupun dari sisi belanja yang terdiri dari belanja tidak langsung maupun belanja langsung. Indikator kontribusi sektor ini dipergunakan untuk menganalisis sektor mana yang paling besar memberikan sumbangan. Untuk mengetahui besarnya kontribusi komponen-komponen pendapatan terhadap total pendapatan dan komponen-

komponen belanja terhadap total belanja digunakan rumus sebagai berikut
(Widodo, 1990) :

$$Ks = \frac{\text{Realisasi}}{\text{Total Realisasi}_i} \times 100 \%$$

Keterangan :

Ks adalah kontribusi realisasi persektor terhadap total Sektor

i adalah total realisasi sektor.

Berikut tabel analisis kontribusi sektor menggunakan rumus terlampir sebagai berikut :

Tabel 4.2
Analisis Kontribusi sektor
Kota Pontianak
2016 – 2019

Sumber: Laporan Audit Kota Pontianak 2016 – 2018 dan 2019 Berbagai Sumber

Tahun Anggaran	Anggaran	Realisasi (PAD)	Kontribusi Sektor
2016	389,368,654,493.49	393,018,186,114.20	100.94%
2017	508,574,478,117.00	476,050,410,313.57	93.60%
2018	478,866,297,320.84	440,358,120,030.76	91.96%
2019	675,838,000,000.00	468,920,000,000.00	69.38%

Berdasarkan analisis perhitungan tabel 4.2 kontribusi sektor - sektor usaha di Pontianak Kota cukup baik penggunaan anggaran dengan realisasi terealisasi dengan seimbang sehingga dapat memberikan kontribusi PAD setiap tahunnya khususnya di aset PERUMDA

3. Rasio Kemandirian

Keuangan Daerah. Rasio kemandirian keuangan daerah menunjukkan kemampuan keuangan daerah dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada masyarakat yang telah

membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

Kemandirian keuangan daerah ditunjukkan oleh besar kecilnya pendapatan asli daerah (PAD) dibandingkan dengan total pendapatan termasuk bantuan dari pemerintah pusat maupun provinsi serta sumber-sumber lainnya. Rasio kemandirian sebagai berikut (Widodo, 1990) :

$$\text{Rasio Kemandirian} = \frac{\text{PAD}}{\text{Total pendapatan}}$$

Berikut tabel analisis kontribusi sektor menggunakan rumus tarlampir sebagai berikut :

Tabel 4.3
Analisis Rasio Kemandirian
Kota Pontianak
2016 – 2019

Tahun Anggaran	Pendapatan Daerah	Pendapatan Asli Daerah (PAD)	Rasio Kemandirian
2016	1,510,803,996,550.49	393,018,186,114.20	26.01%
2017	1,545,622,287,316.32	508,574,478,117.00	32.90%
2018	1,663,204,429,559.76	440,358,120,030.76	26.48%
2019	1,756,000,000,000.00	468,920,000,000.00	26.70%

Sumber : *Laporan Audited Kota Pontianak 2016 – 2018, dan 2019 Berbagai Sumber*

Berdasarkan hasil perhitungan rasio kemandirian diatas dapat dilihat penanganan anggaran di Kota Pontianak baik dan cukup stabil sehingga menunjukkan kemampuan keuangan daerah Kota Pontianak dalam membiayai sendiri kegiatan pemerintahan, pembangunan, dan pelayanan kepada

masyarakat yang telah membayar pajak dan retribusi sebagai sumber pendapatan yang diperlukan daerah.

4.5. Analisis Bangunan Aset Pemerintah Kota Pontianak

Menurut Pasal 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah pada Pasal 285 ayat (1) saat ini masih bersumber dari pajak, retribusi daerah, Laba Perusahaan Daerah, dan Pendapatan Lain – lain yang sah seperti aset - aset milik Pemerintah Kota Pontianak yang memiliki potensi dalam menyumbangkan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Aset tersebut antara lain adalah Gedung Pontianak Convention Centere (Gedung PCC), Gedung Parkir Jalan Suprpto, Kolam Renang Ampera Gedung Serba Guna Di Jalan Zainuddin dan Gedung Gym Fitness Centre Jalan Tabrani Ahmad. Dari kelima aset tersebut dikelompokan menjadi menjadi 2 (dua) Aset Produktif dan Aset Konsumtif

Aset produktif yaitu PCC, Gedung Pakir dan Kolam renang dilihat dari pemasukan bulanan, sedangkan aset konsumtif Gedung Gym dan Gedung Serbaguna.

4.6. Aset Produktif

Dikatakan sebagai aset produktif dikarenakan asset tersebut masih dikelola dengan cukup baik aktif sehingga dapat menyumbang PAD hingga sekarang, adalah sebagai berikut :

4.6.1. Pontianak Convention Center (PCC)

Gedung Pontianak Convention Center terdiri dari 4 lantai. Lantai 1 atau Plenary Hall bisanya dipakai untuk acara exhibtion dan entertainment. Lantai 2 yang memiliki 3 ruangan khusus biasanya difungsikan untuk tempat seminar. Kemudian untuk lantai 4 nya difungsikan untuk restoran,

lounge, dan club. Rata – rata pendapatan yang diperoleh oleh gedung Pontianak Convention Center (PCC) ini adalah kurang lebih \pm 100 – 200 Juta/Bulan.

Table 4.6.1

**Rata – Rata Pemasukan Tahunan Pontianak Covention Center
Tahun 2016 – 2019**

Tahun Berjalan	Rata - Rata Pemasukan
2016	1,300,000,000.00
2017	1,400,000,000.00
2018	1,500,000,000.00
2019	1,600,000,000.00

Sumber data : *lain - lain*

Pada table tersebut diketahui besaran pendapatan Pontianak Convention Centre yang dapat menyumbang PAD Kota Pontianak meningkat setiap tahunnya.

4.6.2. Gedung Pakir

Sebagai sample data pemasukan salah satu aset milik pemkot saat ini adalah gedung parkir yang terletak di jalan Suprpto per periode bulan Januari hingga bulan Oktober tercatat sebagai berikut :

**Tabel 4.6.2
Jumlah Penerimaan Gedung Parkir
Kota Pontianak
Januari – Oktober Tahun 2020**

Spesifikasi kendaraan	Total Kendaraan Parkir per Jan - Okt	Total Pemasukan per Jan - Okt
Kendaraan Roda Dua	35.954	58.190.500
Kendaraan Roda Empat	15.494	55.324.000

Sumber data : *Dinas Perhubungan Kota Pontianak*

Gedung parkir tersebut didirikan dengan tujuan agar tidak akan ada lagi

penumpukan kendaraan yang parkir di bahu jalan. Pengunjung hotel juga biasanya langsung diarahkan ke Gedung Parkir.

4.6.3. Kolam Renang Ampera

Mulai melakukan pembibitan atlet-atlet renang sejak dini dan berkerja sama dengan sekolah-sekolah . Dengan tiket masuk yakni sekitar Rp10 ribu hingga Rp15 ribu, Jika dihitung rata-rata perbulan 1000 pengujung dengan biaya masuk sekitar Rp.15 ribu ada pemasukan sebesar Rp.15 Juta dan rata pendapatan tahunan ada sekitar rata – rata 150 – 200 juta per tahun.

4.7. Aset Konsumtif

Maksud dari aset konsumtif ini adalah aset dari pemerintah kota yang kurang dapat mendatangkan pendapatan, atau aset tersebut terbilang pasif karena hanya mengeluarkan beban biaya pemeliharaan dan pengelolaan.

Antara lain sebagai berikut :

4.7.1. Gedung Serba Guna

Pendapatan sewa gedung serbaguna tersebut rata – rata adalah $\pm 100 - 120$ juta /Tahun jika aktif, namun sekarang gedung belum dapat dioptimalkan kegunaannya..

4.7.2. Gedung Gym

Gedung Gym Center ini dilengkapi dengan peralatan fitness diantaranya 1 unti Smith Machine, 1 unit Bench Press, 1 unit Leg Press, 1 unit Vertical Knee Raise, 1 unit Two Station Home Gym, 1 unit Adjustable Hyperextension, Dumble Rack 1 unit, Dumble Fix Rubber dan Rubber Plat mulai dari berat 2,5 kilogram sampai dengan 20 kilogram. Namun tidak ada besaran pendapatan yang diperoleh dari gedung ini.

4.8. Tinjauan kajian analisis Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa

Berikut beberapa asset perumda yang terdaftar saat ini adalah *Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa*. Berikut adalah table uraian pendapatan daerah yang dihasilkan oleh perumda periode tahun 2016 sampai 2019.

Tabel 4.8.1
Penerimaan PAD Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak
Tahun 2016 – 2019

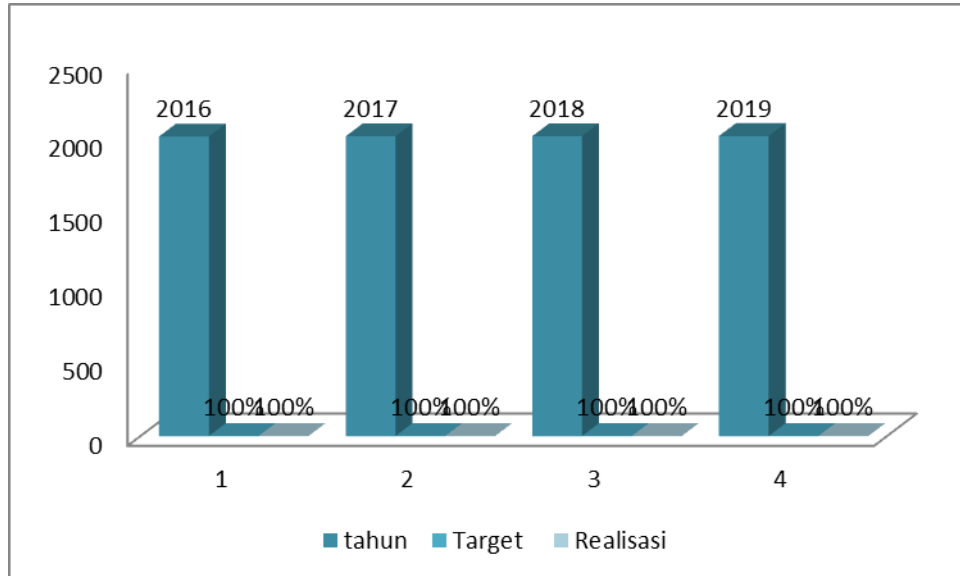
Tahun	Yang Telah Disetor Ke KASDA 55%	Keterangan
2016	29.550.725.181,50	Laba Bersih TB 2013, 2014, dan 2015
2017	5.443.264.674,10	Laba Bersih TB 2016
2018	10.292.328.130,02	Laba Bersih TB 2017
2019	16.000.912.461,29	Laba Bersih TB 2018

Sumber data : Laporan Keuangan 2016 – 2019 Perumda Air Minum Tirta

Berdasarkan Laporan Penerimaan PAD Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak Tahun 2016 – 2019 (tabel 4.8.1) menunjukkan bahwa Penerimaan Daerah (PD) atau laba bersih Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa kurang stabil atau naik turun dimana tidak berbanding lurus dengan realisasi anggaran yang dikeluarkan pada untuk mendukung kinerja setiap bidang – bidang sektor usaha tersebut.

Berikut ditunjukkan oleh grafik besaran target realisasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa per tahun buku 2016 hingga 2019

Grafik 4.8.2
Besaran Target dan Realisasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa
Kota Pontianak
Tahun 2016 - 2019



Sumber data : Laporan Target Perumda Air Minum Tirta 2016-2019

Dilihat dari Keberhasilan indikator capaian persentase target dengan realisasi ini malah berakibat kepada PAD yang tidak maksimal, sehingga Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa memerlukan tindak lanjut rekomendasi tata laksana, manajemen risiko dan pengendalian intern pengelolaan korporasi tidak terlepas dari penggunaan dana sehingga pelaksanaan kegiatan tersebut dapat efisien.

Capaian sasaran optimalisasi kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa adalah fokus kepada perbaikan target kinerja tiap periode tahun kerja berikut adalah beberapa hal yang dilakukan oleh Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa dalam melakukan peningkatan kinerja untuk mengoptimalkan kinerja Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak adalah sebagai berikut :

1. Meningkatkan kualitas Perencanaan Pengawasan dengan Pendekatan Risiko, terukur dan jelas tahapannya, komprehensif, berkesinambungan

sehingga terwujud keselarasan dengan tujuan organisasi.

2. Singkronisasi tata kelola dan pengendalian intern atas proyek-proyek pemerintah pusat, kota dan daerah, termasuk BUMN/BUMD.
3. Peningkatan tata pemerintahan yang baik dan bersih (*good public governance*) dengan melakukan upaya-upaya sebagai berikut:
 - a. Mendorong Perumda untuk lebih meningkatkan akuntabilitas dan pelayanan kepada masyarakat dengan mengoptimalkan penggunaan teknologi informasi dalam mengelola keuangan daerah.

4.9. Tinjauan Kajian Analisis PUD BPR Khatulistiwa.

Berdasarkan data laporan keuangan PUD BPR Khatulistiwa dapat dijelaskan berdasarkan laba bersih tahun berjalan setelah dikurangi laba setelah pajak berdasarkan laporan diterima sebagai berikut penjelasannya

Tabel 4.9.1
PUD BPR Khatulistiwa Pontianak
Tahun 2015 – 2019

Tahun Berjalan	Laba Bersih
2016	1.164.614.000
2017	1.295.495.000
2018	1.455.989.579
2019	1.561.701.886

Sumber data : Annual Report 2016 – 2019 Perumda BPR Khatulistiwa Pontianak.

Berdasarkan laporan realisasi anggaran tahun 2016 – 2019 (tabel 4.9.1) laba usaha meningkat tiap tahun berjalan sehingga diperlukan optimalisasi juga oleh pihak ketiga agar pengelolaan pembiayaan pada PUD BPR Khatulistiwa tepat dan dapat mengimbangi dana pinjaman pihak ketiga dengan perputaran dana di sektor usaha akan lebih cepat

BAB 5

KESIMPULAN DAN REKOMENDASI

5.1. Kesimpulan

Setelah menganalisis dari sudut pandang rasio pertumbuhan, Kontribusi Sektor dan PAD dan mengambil kesimpulan untuk membagi aset yang produktif dan konsumtif.

5.1.1. Kesimpulan Aset Produktif

Berikut ini mengambil 3 (tiga) aset yang produktif yaitu Pontianak Convention Centre (PCC), Gedung Pakir dan Kolam Renang Ampera sebagai berikut :

5.1.1.1. Kesimpulan Hasil Pontianak Convention Centre (PCC)

- a) Pemanfaatan lantai 2 (dua) dan 3 (tiga) untuk pelaksanaan event atau pun training diklat
- b) Penambahan fasilitas penunjang lainnya seperti taman kota, restoran dan café agar lebih banyak dikunjungi di hari biasa.
- c) Penambahan lainnya seperti membuat tempat penarikan uang tunai atau ATM Bersama dengan berkerja sama dengan BANK
- d) Berkerja sama dengan pihak-pihak swasta (dalam hal tata kelola gedung dan management)

5.1.1.2. Kesimpulan Hasil Gedung Parkir

- a) Disewakannya lapak sebagai tempat UMKM dan francise

berkembang terutama di bidang kuliner.

- b) Peningkatan biaya atau fee parkir dengan perhitungan waktu dan tempat penitipan mobil serta motor
- c) Penambahan fasilitas umum yang diperlukan masyarakat contoh : mushola, tempat khusus untuk event, toilet, dan mini mart. Penambahan pemasangan iklan di Gedung pakiran
- d) Lahan kosong di dinding gedung dapat dimanfaatkan dan disewakan kepada pihak tertentu untuk biro iklan atau reklame, sehingga diperoleh retribusi tambahan.
- e) Bekerjasama dengan pihak media untuk membuat gedung parkir ini sebagai icon di Pontianak seperti pengumuman event, atau event fotografi di rooftop.

5.1.1.3. Kesimpulan Hasil Kolam Renang Ampera

- a) Dilakukannya *engagement* dengan pihak – pihak sekolah baik swasta maupun negeri agar melaksanakan training latihan untuk event olahraga cabang renang
- b) Pengelolaan lahan yang masih tersisa oleh Pemerintah Kota agar dipergunakan untuk membangun fasilitas penunjang aset.
- c) Meningkatkan strategi marketing promosi agar dapat menyelenggarakan event di lokasi aset. (contoh : pengadaan event lomba renang se Kalimantan Barat, event promo tiket masuk, dan event lainnya)

5.1.2. Kesimpulan Aset Konsumtif

Berikut ini mengambil 2 (dua) aset yang konsumtif yaitu Gedung serba guna dan Gedung GYM sebagai berikut :

5.1.2.1. Simpulan Hasil Gedung Serba Guna

1. Gedung dapat dialih gunakan sebagai tempat PERUMDA atau usaha milik Pemerintah Kota Pontianak lainnya sebagai kantor.
2. Dilakukan pemeliharaan intensif agar dapat dipergunakan sebagai tempat *event*, contoh : gedung pernikahan, event dan gedung diklat pelatihan atau pendidikan.

5.1.2.2. Kesimpulan Hasil Gedung Gym dan Fitness :

1. Pemberian fee atau biaya masuk bagi masyarakat umum non pelajar yang menggunakan fasilitas gedung sebagai biaya fasilitas pemeliharaan gedung.
2. Dikenakannya bea pajak parkir kendaraan bermotor baik roda dua maupun roda empat yang khusus dikelola oleh Pemkot Kota Pontianak
3. Pengadaan event – event binaraga, pengenalan PT (personal trainer) kepada umum agar dapat menggunakan aset sesuai aturan,
4. Mengadakan kelas pelatihan khusus seperti yoga, senam aerobic, bela diri, zumba dan lainnya di lokasi aset.
5. Bekerjasama dengan media untuk publikasi dan informasi lengkap yang memperkenalkan aset kepada masyarakat luas.

5.2. Rekomendasi optimalisasi Aset – Aset Pemerintah Kota

Pada hasil rekomendasi ini aset yang berasal dari Pemerintah Kota Pontianak dan kelebihan jika diberikan kepada pihak luar sebagai berikut :

5.2.1. Rekomendasi aset

1. Optimalisasi kepada aset produktif dengan meningkatkan strategi marketing dan komersial atau promosi untuk pengembangan aset Pemerintah Kota Pontianak dapat lebih dikenal masyarakat luas.
2. Aset – aset yang terbilang Konsumtif akan lebih baik dikelola pihak swasta dengan perjanjian pembagian hasil, apabila dikelola swasta fokusnya adalah memperkuat pasar serta modal, sumber pendapatan dan perbaikan iklim investasi dan sektor riil. Sehingga aset tersebut penggunaannya lebih maksimal sehingga dapat menambah PAD kepada Pemerintah Kota Pontianak.

5.2.2. Kajian Pengelolaan Pihak Tertentu

Berikut adalah penjabaran kajian apabila pengelolaan aset dikelola oleh beberapa pihak/badan usaha tertentu adalah sebagai berikut :

1. Kelebihan Pengelolaan oleh Perumda

Jika dikelola PERUMDA maka fokusnya adalah pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi ada pada walikota (satu pintu), dan tidak dapat dipailitkan karena aset perumda merupakan aset daerah dan aset daerah tidak dapat disita

2. Kelebihan Pengelolaan Oleh Swasta

Jika dikelola swasta fokusnya adalah memperkuat pasar dan modal, sumber pendapatan dan perbaikan iklim investasi dan sektor riil. Masyarakat akan memperoleh manfaat kepemilikan perusahaan, lapangan kerja, perbaikan kualitas jasa dan produk serta partisipasi kontrol dalam aset dan tergantung dari perjanjian penggunaan aset Pemkot

Tabel 5.1
Usulan Pemanfaatan Aset

Keterangan	Mitra Potensial	Pola Kerjasama
Aset Produktif		
PCC	Cita Rasa	Sewa Bangunan JV (Joint Venture)
Gedung Pakir	Hotel Neo	Sewa Bangunan BOT (Build Operate Transfer)
Kolam Renang Ampera	Sekolah-sekolah KONI	BOT (Build Operate Trasfer)
Aset Konsumtif		
GYM	BUMD	Sewa Bangunan JV (Join Venture)
Gedung Serba Guna	BUMD UMKM	Sewa Bangunan

3. Kelebihan Pengelolaan Oleh Pemerintah Kota

Memberikan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan pengawasan pengendalian. sehingga memberikan strategi dan program yang terintegrasi pengembangan dan optimalisasi potensi ekonomi aset. Fokus terhadap perbaikan organisasi kerja, sistem dan prosedur guna peningkatan pelayanan publik dan pembiayaan pembangunan serta kemudahan publik dan masyarakat menggunakan fasilitas Pemerintah Kota.

5.3. Tinjauan Kesimpulan PERUMDA

Untuk Perumda keuntungan meliputi berfokus pada fungsi pelayanan umum, mendorong pelaksanaan pembangunan, proses pendirian dan perolehan status badan hukum lebih mudah dibandingkan BUMD berbentuk perseroan terbatas, pengambil keputusan tertinggi ada pada Walikota (satu pintu), dan tidak dapat dipailitkan karena aset perumda merupakan aset daerah dan aset daerah tidak dapat disita untuk itu tidak merugikan pemerintah kota dalam hal ini memberikan setoran modal dengan tujuan kepentingan masyarakat.

Beberapa bentuk strategi yang efektif diterapkan untuk meningkatkan kontribusi penerimaan dari Pajak Daerah dan Retribusi Daerah terhadap PAD di masa datang adalah sebagai berikut:

- a) Penetapan target penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah dilaksanakan menerapkan gabungan metode Incremential dan kemampuan merealisasikan target pada tahun sebelumnya yang ditopang dengan hasil analisis potensi yang akurat dan valid,
- b) Penguatan kerjasama dan pelibatan *stakeholder* dalam pengelolaan pajak daerah dan retribusi daerah,
- c) Peningkatan intensitas sosialisasi kepada wajib pajak dan retribusi mengenai pajak daerah dan retribusi daerah yang menjadi kewajiban mereka untuk membayarnya,
- d) Pengembangan penggalan potensi jenis-jenis pajak daerah dan retribusi daerah yang belum tergali secara optimal, sebagaimana yang telah ditetapkan dalam UU No. 28 tahun 2009 tentang Pajak daerah dan Retribusi Daerah,

- e) Peningkatan profesionalisme sumber daya manusia (SDM) aparatur pemungut dan pengelola pajak daerah dan retribusi daerah,
- f) Pungutan retribusi juga fungsi pengawasan terhadap wajib pajak dan retribusi daerah serta terhadap SDM aparatur pemungutnya (contoh : pemungutan retribusi kepada pihak kantin di sekolah, perkantoran dan dinas - dinas harus jelas petugas dan pengarahannya dana retribusi tersebut).

5.4. Rekomendasi Optimalisasi Aset – Aset Perumda

Pada hasil rekomendasi ini aset yang berbadan hukum berasal dari Pemerintah Kota sebagai berikut :

5.4.1. Rekomendasi Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak

Berikut adalah masukan saran, sasaran dan tujuan pengkaji kepada Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak dalam mendongkrak PAD adalah sebagai berikut :

1. Mengembangkan dan membukakan sektor bisnis di bidang perdagangan yaitu membuat Air Minum Kemasan (AMK) khusus yang dikelola oleh pihak Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa Kota Pontianak.
2. Peremajaan sesuai masa pakainya dan usia umum pipa sehingga meminimalisirkan terjadinya pipa bocor.
3. Menambah anak perusahaan agar memaksimalkan pelayanan air bersih kepada masyarakat luas yang belum dapat memperoleh air PDAM.

5.4.2. Rekomendasi PUD BPR Khatulistiwa Kota Pontianak

Berikut adalah masukan saran, sasaran dan tujuan PUD BPR Khatulistiwa Kota Pontianak dalam memaksimalkan setoran modal Pemerintah Kota Pontianak PAD adalah sebagai berikut :

1. Menggunakan setoran modal pemkot yang diberikan untuk pendanaan sektor UMKM agar terciptanya peluang usaha di Kota Pontianak.
2. Meningkatkan kerjasama dengan pihak kontraktor dalam hal pembiayaan pembangunan dan kerjasama MOU untuk akad kredit.
3. Pengarahan kredit pinjaman pegawai ASN atau pekerja swasta kantor kepada BPR khatulistiwa.
4. Menggunakan fasilitas bangunan gedung serbaguna Pemerintah Kota Pontianak yang tujuannya untuk membuka kantor kas dan memudahkan masyarakat bertransaksi dengan lokasi yang mudah diakses.

Daftar Pustaka

- Widodo, Suseno Triyanto. 1990. *Indikator Ekonomi Dasar Perhitungan Perekonomian Indonesia*. Jakarta: Kanisius.
- Peraturan Menteri Nomor 36 Tahun 2011. Pasal 26 ayat (1). Jakarta.
- Peraturan Menteri Nomor 37 Tahun 2011. Jakarta.
- Pontianak Convention Center (PCC). 2014. infoPontianak1771.blogspot.com. Januari
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Pasal 285 (ayat). 2014. Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014. Jakarta. Oktober
- Sujarweni, Wiratna. 2015. *Akuntansi Sektor Publik*. Yogyakarta: Penerbit Pustaka Baru Press.
- Halaskova, Martina and Renata Halaskova. 2016. *Assessment of Financial Capabilities of Local Governments in EU Countries for the Development of Local Publik Services*. *Journal of Local Self-Government*, 14 (3): 379-397.
- Rosemarry., Chinyeaka Justine., Barisua Barry. 2016. *Local Government Financial Autonomy: A Comparative Analysis of Nigeria and Brazil*. *Arabian Journal OF Bussiness and Management Review (OMAN Chapter)*, 5 (10): 38-54.
- pontianakkota.go.id. 2016. *Kolam Renang Ampera, Salah Satu Fasilitas Olahraga Berstandar Olimpiade di Kota Pontianak*. pontinesia.com. Desember
- Andilala. 2018. *Wali Kota Pontianak resmikan Gym Center Pontianak*. kalbar.antaraneWS.com. Januari
- Andilala. 2019. *20 Desember gedung parkir mulai difungsikan*¹⁷. kalbar.antaraneWS.com . Desember

Perumda Air Minum Tirta Khatulistiwa. 2019. Laporan Keuangan. www.pdamtirtakhatulistiwa.com. Desember

Pemerintah Kota Pontianak Badan Perencanaan Pembangunan Daerah. *INDIKATOR EKONOMI KOTA PONTIANAK 2019*. 2019. BPS Kota Pontianak CV. Grahafika Utama Press

Badan Pusat Statistik. 2019. *Statistik Keuangan Pemerintah Kabupaten/Kota SeProvins Kota Pontianak Tahun 2015-2019*. Kota Pontianak: BPS Kota Pontianak.

Peraturan Daerah (PERDA). 2020. Perusahaan Umum Daerah Air Minum Tirta Khatulistiwa. Peraturan.bpk.go.id. Januari

Dinas Perhubungan Kota Pontianak. 2020. Pendapatan Gedung Parkir. Oktober

PP Pengelolaan Keuangan Daerah. 2020. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Pasal 21 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri. litbang.kemendagri.go.id. Desember

LAMPIRAN

Foto lokasi



1)Pontianak Convention Centre, 2) Gedung Parkir,3) Gedung Serba Guna,4) Kolam Renang Ampera, 5) Gedung Gym dan Fitness Centre